

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Kemiskinan merupakan masalah klasik yang terus menjadi perhatian utama pemerintah. Kemiskinan menjadi salah satu ukuran terpenting untuk mengetahui tingkat kesejahteraan suatu rumah tangga. Kemiskinan merupakan masalah pembangunan yang ditandai dengan pengangguran, keterbelakangan, dan keterpurukan. Masalah kemiskinan tidak hanya berada pada ekonomi, namun juga melibatkan masalah lainnya seperti sosial, budaya, politik, bahkan juga ideologi. Sebagaimana dikutip oleh Soetrisno (1995). Mengemukakan bahwa inti dari masalah kemiskinan terletak pada deprivation trap atau jebakan kekurangan yang meliputi lima unsur yaitu (1) kemiskinan itu sendiri (2) kelemahan fisik (3) keterasingan (4) kerentanan, dan (5) ketidakberdayaan.

Berdasarkan laporan statistik (BPS, Maret 2016) tentang tingkat kemiskinan di Indonesia, jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan pada bulan September 2016 mencapai 27,76 juta orang (10,70 %) atau berkurang sebesar 0,25 juta orang dibandingkan dengan kondisi pada bulan Maret 2016 sebanyak 28,01 juta orang (10,86 %). Meski selama periode Maret-September 2016 persentase kemiskinan menurun, namun menurut Suhariyanto (Kepala BPS) jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan naik sebanyak 0,15 juta orang (dari 10,34 juta orang pada Maret 2016 menjadi 10,49 juta orang pada September 2016).

Sementara itu di daerah pedesaan turun sebanyak 0,39 juta orang dari 17,67 juta orang pada Maret menjadi 17,28 juta orang pada September 2016.

Sebagai bagian upaya mengatasi kemiskinan tersebut, maka pemerintah melaksanakan program-program pengentasan kemiskinan meliputi: Jaring Pengaman Sosial (JPS) untuk menutup penurunan daya beli mayoritas penduduk. Aktivitas program ini meliputi: 1) Program keamanan pangan dalam bentuk penyediaan beras murah untuk keluarga miskin. 2) Program pendidikan dan perlindungan sosial. 3) Program kesehatan melalui aktivitas memberikan pelayanan kesehatan dasar bagi keluarga miskin. 4) Program padat karya untuk mempertahankan daya beli rumah tangga miskin.

Salah satu faktor penting yang sering dilupakan oleh pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan adalah dimensi feminis dan ketimpangan gender. Kemiskinan selalu menampilkan wajah perempuan di depan. Banyak peneliti kontemporer mengungkapkan, dalam sebuah keluarga miskin, perempuan senantiasa sebagai katup penyelamat bagi perekonomian keluarga. Perempuan dianggap sebagai katup penyelamat bagi perekonomian keluarga dikarenakan oleh berbagai peran perempuan miskin yang diambil oleh perempuan miskin dalam keluarga meliputi: sebagai pengelola keuangan keluarga, penanggung jawab seluruh pekerjaan domestik, pencari nafkah keluarga dan sebagai salah satu simpul jaringan sosial yang penting dalam hal transfer sosial, khususnya pada masa-masa kritis dan krisis (Basuki dan Presetyo, 2007). Komitmen internasional United Nation Millenium Declaration (2000) memuat satu rekomendasi penting untuk diterapkan di semua negara yaitu: ” to promote gender equality and

empowerment of women as effective ways to combat poverty, hunger and disease and to stimulate development that is sustainable”.

Komitmen internasional tersebut menegaskan pentingnya upaya mewujudkan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan sebagai cara efektif untuk mengeliminasi kemiskinan, kelaparan, dan penyakit serta untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. Penerapan perspektif gender dalam melihat kemiskinan tidak untuk mengecilkkan arti kemiskinan yang dialami laki-laki, tetapi untuk menegaskan bahwa kemiskinan yang dialami perempuan bersifat spesifik, sehingga dibutuhkan adanya penanganan yang khusus pula.

Banyaknya persoalan yang terkait dengan perempuan seperti masih rendahnya akses perempuan dalam pendidikan yang ditandai dengan rendahnya rata-rata lama sekolah perempuan dibandingkan dengan laki-laki, rendahnya akses perempuan dalam bidang ekonomi, kondisi kesehatan perempuan yang masih rendah, dan ditandai dengan tingginya angka kematian ibu melahirkan. Dan rendahnya akses perempuan dalam politik dan hukum, serta perlakuan diskriminasi terhadap perempuan. Oleh sebab itu dibentuk sebuah lembaga Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB). Kondisi tersebut akan berdampak terjadinya ketimpangan gender yang ditandai dengan masih rendah pembangunan dan pemberdayaan gender. Untuk itu DP3AKB mempunyai sebuah program pemberdayaan perempuan kepala keluarga, untuk membangun tatanan masyarakat yang sejahtera terhadap kesetaraan peran, posisi dan status mereka, meningkatkan taraf hidup, dan

membuka akses perempuan kepala keluarga terhadap berbagai sumberdaya kehidupan

Berdasarkan pengamatan di atas, peneliti bermaksud dan membahas permasalahan tersebut dalam penelitian yang berjudul : *Model Pemberdayaan Perempuan Miskin Melalui Pelatihan Kewirausahaan Berbasis Potensi Lokal Bagi Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA) di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Bandung.*

B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian

Hal-hal yang dikemukakan dari latar belakang permasalahan, dapat disimpulkan menjadi beberapa point sebagai rumusan masalah. Rumusan masalah tersebut dikemukakan dalam bentuk pertanyaan penelitian sebagai berikut :

- a. Bagaimana Konsep Pemberdayaan Perempuan Miskin Melalui Pelatihan Kewirausahaan Berbasis Potensi Lokal bagi Perempuan Kepala Keluarga di DP3AKB Kota Bandung ?
- b. Bagaimana Proses Pemberdayaan Perempuan Miskin Melalui Pelatihan Kewirausahaan Berbasis Potensi Lokal bagi Perempuan Kepala Keluarga di DP3AKB Kota Bandung ?
- c. Bagaimana Hasil dari Pemberdayaan Perempuan Miskin melalui Pelatihan Kewirausahaan Berbasis Potensi Lokal bagi Perempuan Kepala Keluarga di DP3AKB Kota Bandung ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka dapat dicapai tujuan penelitian sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui Konsep Pemberdayaan Perempuan Miskin Melalui Pelatihan Kewirausahaan Berbasis Potensi Lokal bagi Perempuan Kepala Keluarga di DP3AKB Kota Bandung ?
- b. Untuk mengetahui Proses Pemberdayaan Perempuan Miskin Melalui Pelatihan Kewirausahaan Berbasis Potensi Lokal bagi Perempuan Kepala Keluarga di DP3AKB Kota Bandung ?
- c. Untuk mengetahui hasil dari pemberdayaan perempuan miskin melalui pelatihan kewirausahaan berbasis potensi lokal bagi Perempuan Kepala Keluarga di DP3AKB Kota Bandung ?

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Akademis
 - a. Agar peneliti mendapat tambahan dan memperkaya hasanah ilmu pengetahuan, khususnya di bidang pengembangan masyarakat.
 - b. Diharapkan dapat memberikan kontribusi atau saran dan sumbangan pemikiran kepada akademik maupun jurusan Pengembangan Masyarakat Islam (PMI).
 - c. Membantu peneliti dalam meneliti, memahami, menjelaskan misi Pengembangan Masyarakat Islam untuk mencapai khairu ummah

2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan atau sumbangan pemikiran bagi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, dan bagi Instansi terkait, pemerintah, maupun pihak-pihak luar secara umum dalam hal menangani permasalahan yang dihadapi dalam proses peningkatan kualitas kesejahteraan masyarakat.

E. Landasan Pemikiran

a. Hasil Penelitian sebelumnya

- 1) **Skripsi Wiwid Sri Lestari**, Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2011 yang berjudul “Peran Dinas Sosial Dalam Mengentaskan Kemiskinan (Studi Strategi Pemberdayaan Masyarakat Miskin Melalui KUBE Lembu Santosa Di Desa Gadingsari Sanden Bantul). Hasil penelitian tersebut ialah pertama, strategi pemberdayaan yang dilakukan Dinas Sosial DIY melalui KUBE Lembu Santosa di Desa Gadingsari, Sanden, Bantul adalah strategi pendekatan tradisional dan transformatif, kedua, melalui program KUBE tersebut, kehidupan anggota KUBE berangsur-angsur membaik ditandai dengan berkembangnya usaha mereka dan ketiga, peran Dinas Sosial dalam program ini adalah Fasilitator dan Broker.
- 2) **Skripsi Jumariyah**, Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2011 yang berjudul “Strategi Pemberdayaan Perempuan Melalui Koperasi Wanita Krido Mulyo di Dusun Joho”.

Hasil penelitian tersebut ialah pertama, strategi pemberdayaan ekonomi perempuan melalui koperasi ini adalah pemberdayaan ekonomi yang mengacu pada pendekatan pengentasan kemiskinan melalui koperasi yang berfungsi membangun dan mengembangkan potensi untuk mensejahterakan masyarakat dari segi ekonomi ataupun sosial, kedua, hasil yang dicapai oleh masyarakat Dusun Joho dari pemberdayaan ekonomi perempuan yaitu dalam segi sosial terjalinnya tali silaturahmi antar warga, tumbuhnya rasa sosial, tidak merasa minder ataupun malu ketika berkumpul dengan orang lain dan ketika mengajukan pendapat. Dari beberapa penelitian diatas, semuanya melakukan penelitian dengan pembahasan yang sama yaitu mengenai pemberdayaan perempuan ataupun pemberdayaan ekonomi melalui sebuah program dari lembaga baik pemerintah maupun swasta di daerah tertentu.

b. Landasan Teoritis

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) bahwa model berarti pola (ragam, acuan dan sebagainya) dari sebuah hal yang ingin dibuat atau dihasilkan. Jadi model ini sebuah contoh yang paling baik dan dapat mewakili sebuah objek. *Menurut Marx* merupakan sebuah keterangan secara terkonsep yang dipakai sebagai saran atau referensi untuk melanjutkan penelitian empiris yang membahas suatu masalah. Dan menurut *Murty* model merupakan sebuah pemaaran tentang sistem tertentu yang sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai peneliti.

Pemberdayaan dalam bahasa Indonesia merupakan terjemahan dari bahasa Inggris yaitu *empowerment* berasal dari kata *power* yang berarti kekuatan. Pemberdayaan adalah sebuah proses dan tujuan. Sebagai proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan. Sebagai tujuan, maka pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya (Edi Suharto, 2010 : 59-60).

Pemberdayaan perempuan merupakan upaya untuk mewujudkan kesetaraan peran, akses, dan kontrol perempuan dan laki-laki di semua bidang pembangunan. Menurut *Novian (2010)* pemberdayaan perempuan adalah upaya perempuan untuk memperoleh akses dan kontrol terhadap sumber daya, ekonomi, sosial, politik dan budaya, agar perempuan dapat mengatur diri dan meningkatkan rasa percaya diri untuk mampu berperan dan berpartisipasi aktif dalam memecahkan masalah, sehingga mampu membangun kemampuan dan konsep diri.

Program-program pemberdayaan perempuan yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat selama ini merupakan upaya untuk senantiasa mewujudkan terciptanya dan terdistribusinya manfaat pembangunan bagi laki-laki dan perempuan secara berimbang. Berbagai langkah dapat dilakukan untuk menciptakan kesetaraan laki-laki dan perempuan atau kesetaraan gender, antara lain dengan mengembangkan kewirausahaan keluarga sehingga dapat terwujud peran yang seimbang antara laki-laki dan perempuan dalam keluarga untuk bersama-sama membangun dan mengembangkan perekonomian keluarga demi mencapai kesejahteraan keluarga. Meskipun upaya membangun kesetaraan gender tersebut telah dilakukan cukup lama, namun masih terdapat banyak hal dan sisi kehidupan yang belum mencerminkan adanya kesetaraan antara perempuan dan laki-laki.

Kurangnya perhatian dan intensitas serta kesinambungan program pemberdayaan perempuan merupakan salah satu penyebab belum terciptanya kesetaraan gender. Oleh karena itu diperlukan upaya yang lebih giat, intensif, sungguh-sungguh, dan berkesinambungan untuk membangun kesetaraan gender melalui program-program pemberdayaan perempuan. Di lain pihak, pada saat ini masih banyak kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang belum peka gender, sebelum SaraH. Longwee mengembangkan teknik analisis gender yang dikenal dengan “Kerangka Pemampuan Perempuan”. Pendekatan pembangunan selama ini belum mempertimbangkan manfaat pembangunan secara adil terhadap

perempuan dan laki-laki sehingga turut memberi kontribusi terhadap timbulnya ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender.

Longwee mendasarkan pada pentingnya pembangunan bagi perempuan, bagaimana menangani isue gender sebagai kendala pemberdayaan perempuan dalam upaya memenuhi kebutuhan spesifik perempuan dan upaya mencapai kesetaraan gender (Muttalib, 1993). Pemberdayaan perempuan mencakup tiga hal: (1) capacity building bermakna membangun kemampuan perempuan (2) cultural change yaitu perubahan budaya yang memihak kepada perempuan (3) structural adjustment adalah penyesuaian struktural yang memihak perempuan.

Kemiskinan didefinisikan sebagai ketidakmampuan memenuhi standar hidup minimum (Mudrajat Kununcoro. 1997). Menurut (Tjokrowinoto,1995 dalam Ngadiyono. 2008) dikatakan bahwa kemiskinan tidak hanya menyangkut persoalan kesejahteraan semata, tetapi kemiskinan juga menyangkut persoalan kerentanan, ketidakberdayaan, tertutupnya akses terhadap peluang kerja, menghabiskan sebagian besar penghasilannya untuk kebutuhan konsumsi, angka ketergantungan yang tinggi, rendahnya akses terhadap pasar, dan kemiskinan terefleksi dalam budaya kemiskinan yang diwariskan ke tiap generasi.

Kemiskinan dapat dibedakan menjadi dua. yaitu kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. Seseorang dikatakan miskin absolut jika pendapatannya berada di bawah garis kemiskinan sehingga tidak cukup

untuk memenuhi hidup minimum seperti sandang, papan, pangan, kesehatan, dan pendidikan. Sedangkan kemiskinan relatif jika seseorang telah dapat hidup di atas garis kemiskinan akan tetapi masih di bawah kemampuan masyarakat sekitarnya, (Gunawan Sumodiningrat, 1988 dalam Suwarno, 2008).

Penyebab kemiskinan dapat terjadi karena kondisi alamiah dan ekonomi, kondisi struktural dan sosial, serta kondisi kultural (budaya). Kemiskinan alamiah dan ekonomi timbul akibat keterbatasan sumber daya alam, manusia, dan sumberdaya lain sehingga peluang produksi relatif kecil dan tidak dapat berperan dalam pembangunan. Kemiskinan struktural dan sosial disebabkan hasil pembangunan yang belum merata, tatanan kelembagaan dan kebijakan dalam pembangunan. Sedangkan kemiskinan kultural (budaya) disebabkan sikap atau kebiasaan hidup yang merasa kecukupan sehingga menjebak seseorang dalam kemiskinan (Nugroho dan Dahuri, 2004).

Sementara jika kemiskinan dilihat dari sekuen/pola waktu, maka dapat dibedakan menjadi empat yaitu (1)*Persisten poverty* adalah kemiskinan yang telah kronis atau turun ternurun dan pada umumnya banyak terjadi di daerah sumber daya alamnya kritis dan lokasinya terisolir dengan daerah lain. (2)*Ciclical poverty* adalah kemiskinan yang mengikuti pola siklus ekonomi secara keseluruhan. (3)*Seasonal poverty* adalah kemiskinan bersifat musiman yang sering dialami oleh para nelayan dan petani tanaman pangan. (4)*accidental poverty* adalah kemiskinan yang

diakibatkan adanya bencana alam atau suatu kebijakan pemerintah yang mengakibatkan penurunan kesejahteraan. (Ginjar Kartasasmita, 1996 dalam Suwarno, 2008).

Wirausaha secara lengkap juga dikemukakan oleh Josep Schumpeter (1998), yaitu sebagai orang yang mendobrak sistem ekonomi yang ada dengan memperkenalkan barang dan jasa yang baru, dengan menciptakan bentuk organisasi baru, dan bahan baku baru.

Robert Hisrich dan P Peters (1995) dalam Buchari Alma (2002) menyatakan bahwa : *“entrepreneur is the process of creating something different with value by devoting the necessary time and effort, assuming the accompanying financial, psychological, and social risk and receiving the resulting rewards of monetary and personal satisfaction”*. Dengan bahasa yang sederhana dapat dikatakan bahwa entrepreneur atau wirausaha adalah merupakan proses menciptakan sesuatu yang berbeda dengan mengabdikan seluruh waktu dan tenaganya disertai dengan menanggung resiko keuangan, kejiwaan, sosial, dan menerima balas jasa dalam bentuk uang dan kepuasan pribadinya.

Menurut Sumantri (2000: 2) “pelatihan sebagai proses pendidikan jangka pendek yang menggunakan cara dan prosedur yang sistematis dan terorganisir. Para peserta pelatihan akan akan mempelajari pengetahuan dan keterampilan yang sifatnya paktis untuk tujuan tertentu”. Tujuan pelatihan menurut Fandy Tjiptono & Anastasia Diana (1995: 223) adalah untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap karyawan serta

meningkatkan kualitas dan produktivitas organisasi secara keseluruhan, dengan kata lain tujuan pelatihan adalah meningkatkan kinerja dan pada gilirannya akan meningkatkan daya saing.

Walter A. Friedlander yang dikutip dalam (Wibhawa, Raharjo, & Budiarti, 2010 :24) mengemukakan bahwa kesejahteraan sosial adalah “sistem yang terorganisasi dari usaha-usaha sosial dan lembaga-lembaga sosial yang ditujukan untuk membantu individu maupun kelompok dalam mencapai standar hidup dan kesehatan yang memuaskan, serta untuk mencapai relasi perseorangan dan sosial yang dapat memungkinkan mereka mengembangkan kemampuan-kemampuan mereka secara penuh, serta untuk mempertinggi kesejahteraan mereka selaras dengan kebutuhan-kebutuhan keluarga dan masyarakat”. Pemenuhan kebutuhan dasar (terutama pendidikan dasar, pelayanan kesehatan dasar dan pelayanan kesejahteraan sosial) selayaknya merupakan kewajiban pemerintah; karena masyarakat juga telah dibebankan membayar pajak baik secara individu maupun melalui korporasi tempat bekerja (Harry & Kusnaka, 2005 : 17-18).

c. Kerangka Konseptual

Model Pemberdayaan merupakan bentuk pendampingan yang dilakukan agar mereka mendapat bantuan pelayanan dalam hal pengetahuan dan keterampilan. Indikator mutu program pemberdayaan adalah terjadinya perubahan perilaku, peningkatan penghasilan, bertambahnya wawasan dan keilmuan serta keterampilan. Pada akhirnya

terwujud kemandirian sehingga fakir miskin terlepas dari kemiskinan dan ketergantungan.

***Bagan 1.1 Kerangka Berpikir Model Pemberdayaan Perempuan Miskin
Melalui Pelatihan Kewirausahaan Bagi Kelompok***



F. Langkah-Langkah Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini penulis lakukan di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB). Yang beralamatkan di jalan Ir. H. Juanda No 250 Bandung.

Lokasi ini dipilih karena sesuai dengan bidang studi pengembangan masyarakat Islam, dan daerah ini tidak sulit untuk dijangkau ketika akan diteliti.

2. Metode Penelitian

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode deskriptif-kualitatif. Yaitu semata-mata hanya melukiskan keadaan objek atau peristiwanya tanpa suatu maksud mengambilnya kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.

Penelitian deskriptif ini merupakan penelitian yang benar-benar hanya memaparkan apa yang terdapat atau terjadi dalam sebuah kancah, lapangan, atau wilayah tertentu. Data yang terkumpul diklasifikasikan atau dikelompok-kelompokkan menurut jenis, sifat dan kondisinya. Sesudah datanya lengkap, kemudian dibuat kesimpulannya (Arikunto,2010:3).

3. Jenis Data

Jenis data yang dirumuskan merupakan jawaban atas pertanyaan yang diajukan terhadap rumusan dan tujuan masalah yang telah ditetapkan.

Selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dll. Adapun jenis data yang ditambahkan dalam penelitian adalah :

- a. Konsep pemberdayaan perempuan miskin melalui pelatihan kewirausahaan berbasis potensi lokal bagi perempuan kepala keluarga di DP3AKB kota Bandung.
- b. Proses pemberdayaan perempuan miskin melalui pelatihan kewirausahaan berbasis potensi lokal bagi perempuan kepala keluarga di DP3AKB kota Bandung.
- c. Hasil pemberdayaan perempuan miskin melalui pelatihan kewirausahaan berbasis potensi lokal bagi perempuan kepala keluarga di DP3AKB kota Bandung.

4. Sumber Data

Sumber data penelitian ini terbagi dua, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Sumber Data Primer

Sumber pertama sebuah data dihasilkan. Dalam penelitian ini sumber data primer meliputi pihak dari kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, yakni ibu Neni selaku ketua dari bidang peningkatan kualitas hidup perempuan, karena beliau yang memaham dan menangani permasalahan yang berkaitan dengan kualitas hidup perempuan.

b. Sumber Data Sekunder

Data Sekunder, yaitu data pendukung yang diperoleh dari catatan lapangan atau sebagai informasi penunjang yang berkaitan dengan masalah penelitian, berupa bahan pustaka, yakni buku – buku, majalah, artikel, dan dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi yaitu melakukan pengamatan secara langsung ke objek penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan atau aktivitas yang dilakukan (Riduwan, 2012 :42). Peneliti akan meninjau langsung kegiatan kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB). Adapun hasil observasi tersebut akan dikumpulkan melalui sebuah data yang dapat memudahkan peneliti mengetahui mengenai pemberdayaan perempuan di DP3AKB tersebut.

b. Wawancara

Wawancara adalah suatu cara pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya (Riduwan, 2012 :41). Wawancara ini dilakukan kepada sampel penelitian sebagai usaha pengumpulan data secara lisan yang dilakukan peneliti dalam melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang akan diteliti. Dalam hal ini peneliti menggunakan wawancara tidak terstruktur atau wawancara mendalam. Wawancara ini langsung

dilakukan dengan salah satu staf kantor dari DP3AKB kota Bandung. Yaitu ibu Neni selaku ketua dari bidang peningkatan kualitas hidup perempuan, karena beliau yang memaham dan menangani permasalahan yang berkaitan dengan kualitas hidup perempuan.

c. Studi Dokumentasi

Proses pengumpulan data yang diperoleh melalui dokumen – dokumen. seperti berupa, buku, catatan, arsip, surat-surat, majalah, surat kabar, jurnal, laporan penelitian dan lain-lain.

6. Analisis Data

Analisis data merupakan bagian dari penelitian ilmiah. Dengan analisis data, maka akan terlihat hasil dari penelitian yang kita lakukan. Analisis data akan dilakukan berdasarkan hasil observasi langsung ke lokasi penelitian dan melakukan wawancara dengan para pengurus serta pihak terkait dengan penelitian yang dilakukan kali ini. Wawancara yang dilakukan ialah wawancara tidak terstruktur artinya wawancara dilakukan sesuai keperluan dan sesuai dengan rumusan masalah yang telah ditentukan kemudian dipaparkan secara ilmiah sesuai dengan hasil wawancara yang telah dilakukan.

Untuk data yang bersifat kualitatif akan dianalisis dengan cara sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Proses ini dimaksudkan untuk mengefesienkan waktu, biaya, dan proses pencarian data dalam penelitian. Agar penelitian ini tidak

keluar dari tujuan awal, maka sebelumnya harus mengetahui terlebih dahulu data apa yang akan kita butuhkan. Mulai dari data yang sifatnya umum dan kemudian dikelompokkan untuk lebih mudah dalam proses penelitian. Dalam hal ini data yang dibutuhkan yakni tentang Pemberdayaan Perempuan Miskin melalui Pelatihan Kewirausahaan bagi Perempuan Kepala Keluarga.

2. Klarifikasi Data

Data yang sudah terkumpul sesuai dengan topik pembahasan penelitian, yaitu tentang Model Pemberdayaan Perempuan Miskin melalui Pelatihan Kewirausahaan bagi Perempuan Kepala Keluarga.

3. Verifikasi Data

Langkah ini dilakukan untuk menguji data yang didapat tentang Pemberdayaan Perempuan dengan teori-teori yang telah dibahas dalam kerangka pemikiran. Langkah ini dimaksudkan untuk mengetahui adanya keselarasan antara teori dengan realita.

4. Tafsiran Data

Tafsiran dilakukan bila data yang diperoleh dari lapangan khususnya melalui wawancara, hasilnya kurang memuaskan.

5. Menarik Kesimpulan

Sebagai langkah terakhir dari penelitian dan dari data yang telah terkumpul, akan ditarik suatu kesimpulan tentang bagaimana

Model Pemberdayaan Perempuan Miskin melalui Pelatihan Kewirausahaan berbasis Potensi Lokal bagi Perempuan Kepala Keluarga.

